

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

M Amin¹ Baehaqi²

¹institit Pemerintahan Dalam Negeri

²Universitas Islam Al Azhar Mataram

Email: aminlombok77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten lombok timur. Jumlah responden berjumlah 60 orang regresi penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur. sistem pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja

PENDAHULUAN

Pada Undang-undang No. 6 Tentang Desa 2014 dijelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sejalan dengan pembangunan desa diperlukan pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki karena akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Scott (2006) mengatakan bahwa sebagai pengelola sumber daya, maka masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut.

Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan beberapa tahapan yaitu penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta *review* dan evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah bersinergi dengan rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat diketahui dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah telah menjadi salah satu item yang tercantum

didalam dasar hukum atau aturan organisasi, oleh sebab itu organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensisikan hasil dari proses organisasi yakni, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010: 88)

Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, terutama pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri.

Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaran pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan pemerintahan serta adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam tercapainya *good governance* di tingkat pemerintah desa. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggung jawab, dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan instansi pemerintah desa.

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Berkaitan dengan pemerintah desa, pejabat pada pemerintah desa dalam memberikan laporan keuangan kepada masyarakat yang disajikan dan memberikan manfaat bagi instansi dan pengguna informasi dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Selain itu, pada teori harapan juga menyatakan bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untuk melakukan usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan meningkatkan laporan keuangan yang akuntabel.

Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan akuntabilitas kerjanya melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik kemudian melakukan pengendalian atas akuntabilitasnya berdasarkan evaluasi atas laporan kerjanya. Dengan demikian setiap instansi mulai dari tingkat bawah (desa), daerah maupun pusat diwajibkan melaporkan hasil kerjanya secara periodik termasuk pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur.

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran penilaian yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa. Kinerja aparat pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan serta keahlian aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik yang menunjukkan rendahnya pertanggungjawaban atau akuntabilitas setiap aktivitas aparatur pemerintah desa.

Penyediaan informasi yang akuntabel tidak bisa dipisahkan dengan sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara objektif, jujur, dan transparan (BPKP, 2011). Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang. Penelitian Wahyuni (2013) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Khasanah (2016) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan

adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan akuntabilitas, sebagai variabel dependen (variabel yang dipengaruhi), sedangkan kinerja keuangan desa, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran variabel independen (variabel yang mempengaruhi).

Penelitian ini menggunakan data primer melalui tehnik survei. responden adalah kepala desa, sekertaris desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Lombok Timur yang berperan dalam mengelola dan mengawasi keuangan pemerintah desa.

Statistik deskriptif meliputi pengukuran dan penilaian cirri-ciri data sampel yaitu maximum, minimum, rata-rata standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Skewness dan kurtosis hendaknya tidak bernilai lebih kecil dari -1 dan tidak lebih besar dari +1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dilakukannya uji t untuk melihat apakah setiap variabel independen (X_1, X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5.713	3.524	1.621	.111
	Kinerja Keuangan	.343	.113	2.565	.001
	Sistem Pelaporan	.492	.109	4.524	.000

Sumber: Data Diolah 2019

Variabel kinerja keuangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,524 lebih besar dari t_{tabel} 2,05 atau nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_2 diterima, bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen yang tak luput dari pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Eksistensi pengendalian akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Variabel sistem pelaporan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,524 lebih besar dari t_{tabel} 2,05 atau nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 diterima dan H_2 ditolak, bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage* stakeholdernya tergantung pada strategi yang di adopsi perusahaan baik strategi aktif maupun pasif. Salah satunya melalui penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap manajemen. Kepercayaan ini yang seterusnya menjadi modal awal bagi manajemen untuk melakukan akses permodalan dan sebagainya. *Stakeholder theory* menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan *stakeholder* akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktis akuntansi perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Jika laporan yang dibuat pemerintah desa dengan baik akan menyebabkan pertanggung jawaban baik juga. Laporan yang dibuat oleh para aparatur pemerintah desa harus andal dan relevan sehingga jika laporan yang buat tidak baik pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan akan tidak baik pula.

Penelitian ini sejalan dengan Hidayatullah dan Herdjiono (2015) “Pengujian persial terhadap sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Stakeholder Theory* Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, maka keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. *Stakeholder* dan Organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu di tentukan dengan hubungan antara *stakeholder* dan organisasi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur. sistem pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur.

REFRENSI

- Diansari, E. R. (2013). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Eko Setyanto. (2018). Faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9 nomor 1(2086–4159), 89–105
- Enggar; Sri Rahayu; dan Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi. Volume 13 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, Jambi.
- Fitri Lestari (2015), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program Studi Akuntansi FE UMRAH
- Hanifah, S.I dan Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
- Farazmand, A. (2009). *Building Administrative Capacity for The Age of Rapid Globalization: A Modest Prescription for The Twenty-First Century. Public Administration Review*, 69(6), 1007 - 1020.
- Philip Kotler .(2003) Manajemen Pemasaran Edisi Kesembilan, Jakarta: PT Indeks Gramedia.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I Wayan Suardana Telabah. 2018. determinan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap kinerja manajerial pada pemerintah daerah. Thesis. universitas mataram
- Jogianto (2007) Sistem Informasi keperilakuan. Edisi revisi jogjakarta: Andi Offset.
- Raharjo, T. Sjamsuddin, S. Hardjanto, I. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1).
- Rasul Syahrudin. (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran, Jakarta: Detail Rekod
- Rofika & Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197-209.